

## The Influence of Local Government Size and Economic Growth on Local Government Financial Performance

Nasirwan<sup>1</sup>, Aisah Br Ginting<sup>2</sup>, Christina Manalu<sup>3</sup>, Desy Amelia Sinaga<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: [aisahginting4@gmail.com](mailto:aisahginting4@gmail.com); [christinamanalu45@gmail.com](mailto:christinamanalu45@gmail.com); [desyameliasinaga@gmail.com](mailto:desyameliasinaga@gmail.com)

### ABSTRAK

Pengukuran kinerja menjadi elemen penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan, termasuk peraturan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Dengan mengukur kinerja keuangan, kita dapat memperoleh umpan balik yang berharga terkait kesesuaian dan keakuratan penerapan peraturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel purposive sampling, dengan populasi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2018.

**Keyword:** Ukuran Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi; Kinerja Keuangan

### ABSTRACT

*Performance measurement is an important element in assessing the effectiveness of policy implementation, including financial regulations at the local government level. By measuring financial performance, we can obtain valuable feedback regarding the suitability and accuracy of implementing these regulations. The aim of this research is to analyze the influence of local government size and economic growth on local government financial performance. In this study, the sample used in this research was a purposive sampling sample, with the population of Regional Governments and Regency/City Regional People's Representative Councils (DPRD) in Indonesia in 2018.*

**Keyword:** Size of government; Economic growth; Financial performance

### Corresponding Author:

Desy Amelia Sinaga,  
Universitas Negeri Medan,  
Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221, Indonesia  
Email: [desyameliasinaga@gmail.com](mailto:desyameliasinaga@gmail.com)



## 1. INTRODUCTION

Otonomi daerah merupakan kebebasan yang suatu daerah punya untuk menciptakan peraturan daerah, menyusun, mengelola, dan melaksanakan kebijakan keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015). Otonomi daerah merupakan manifestasi dari desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya secara mandiri. Implementasi otonomi daerah ini menjadi langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara demokratis, adil, adil dan berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci suksesnya pembangunan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan semakin besarnya kekuasaan pemerintah daerah, hal ini juga menimbulkan harapan dan tuntutan masyarakat yang semakin besar agar pemerintahan daerah dapat berfungsi dengan lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting, karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Pengukuran kinerja memiliki fungsi untuk mengevaluasi program yang telah berjalan, sarana perbandingan atas layanan yang diberikan, dan sebagai alat komunikasi dengan publik (Saraswati, 2019). Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah

menerapkan peraturan keuangan dengan baik dan akurat adalah dengan meninjau kinerja keuangan pemerintah daerah.

Upaya pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang optimal tidak hanya didorong oleh kewajiban semata, melainkan juga oleh tujuan strategis untuk mendapatkan legitimasi dan memperkuat kekuasaan di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan teori isomorfisme institusional, yang menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya bersaing untuk memperoleh sumber daya dan pelanggan, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan legitimasi, pengaruh politik, dan kepatuhan dari masyarakat.

Besar kecilnya pemerintahan dapat menjadi salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pemerintahan daerah berskala besar, maka pemerintah daerah juga mempunyai peluang yang besar untuk memperoleh kemudahan lebih dalam mengatur, mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah. Karena ukurannya yang besar, pemerintah daerah juga mempunyai persyaratan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan mereka.

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Ukuran pemerintah dapat diprosikan sebagai total aset yang dimiliki daerah tersebut dan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan ukuran pemerintah daerah yang besar, dan pemerintah daerah yang mampu memanfaatkan sumber – sumber potensi daerahnya serta dapat mengelola dengan baik seluruh potensi daerah maka secara tidak langsung pendapatan asli daerah juga dipastikan akan meningkat (Mulyani & Wibowo, 2017).

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya, terutama dengan membangun sarana dan prasarana yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor perekonomian akan semakin terdampak dengan adanya sarana dan prasarana yang dekat dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya kegiatan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan positif yang dialami dalam periode tertentu. Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan adanya penurunan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi indikator penting untuk menilai laju perkembangan ekonomi dan efektivitas investasi dalam maupun luar negeri.

## 2. LITERATURE REVIEW

### A. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hasil keuangan adalah segala hak dan kewajiban wilayah yang dapat berupa uang dan barang yang dapat diubah menjadi milik wilayah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut definisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, perekonomian daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dinilai secara moneter, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian suatu bentuk kinerja dalam hal penerimaan dan pengeluaran di bidang keuangan daerah dengan menerapkan sistem keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau peraturan untuk satu periode anggaran (Sari, 2016 ). Pengukuran kinerja pada umumnya merupakan cara untuk menunjukkan hasil implementasi suatu kegiatan/kebijakan, namun pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan kegiatan/kebijakan tersebut (Mahmudi, 2011).

Hakikat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah derajat pencapaian rencana yang dituangkan dalam APBD, termasuk anggaran dan pelaksanaannya. Bila capaian melebihi rencana maka dapat dikatakan capaian daerah baik, namun sebaliknya bila capaian tidak sesuai rencana atau lebih rendah dari rencana maka capaian tersebut kurang baik.

Menurut Mahmudi (2011), analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain:

- Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah. Hal ini melibatkan penilaian kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri dan menutupi pengeluarannya tanpa bergantung heavily on central government transfers.
- Mengukur efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatannya. Hal ini melibatkan evaluasi seberapa baik pemerintah daerah memungut pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya.
- Menilai sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya. Hal ini melibatkan pemeriksaan upaya pemerintah daerah untuk memperluas basis pendapatannya dan meningkatkan efisiensi penagihannya.

- Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap struktur pendapatan secara keseluruhan. Hal ini melibatkan analisis kepentingan relatif dari sumber pendapatan yang berbeda, seperti pajak, retribusi, dan hibah, dalam menghasilkan total pendapatan.
- Melacak pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran dari waktu ke waktu. Hal ini melibatkan analisis tren pendapatan dan pengeluaran untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau potensi masalah.

### **B. Ukuran Pemerintah Daerah**

Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang besar memiliki keuntungan dalam hal kemudahan operasional dan pelayanan publik. Hal ini mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan daerah, yang menunjukkan peningkatan efisiensi. Skala besar memudahkan operasional dan meningkatkan efisiensi keuangan. Namun, tekanan untuk mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah dengan aset besar.

Variasi ukuran pemerintahan daerah dalam penelitian ini dikategorikan sebagai tekanan isomorfik paksa. Hal ini dikarenakan, semakin besar suatu daerah, semakin besar pula aset yang dimilikinya. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik terhadap potensi penyelewengan dana, sehingga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tekanan publik ini pada akhirnya memaksa pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan publik akan mengakui kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab.

### **C. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produktivitas per orang dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek:

- Proses: Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat pada kondisi ekonomi pada satu waktu, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan.
- Output per kapita: Pertumbuhan ekonomi diukur dengan jumlah produk barang dan jasa per orang. Hal ini memerlukan dua pertimbangan: total produk (PDB) dan jumlah penduduk.
- Jangka panjang: Peningkatan output per kapita harus diamati dalam jangka waktu yang cukup lama (minimal 10 tahun, bahkan bisa lebih).

Besar kecilnya pemerintahan daerah dalam penelitian ini merupakan force isomorphic pressure, karena besar kecilnya pemerintahan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai aset yang besar, sehingga pengawasan terhadap masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan pemerintahan daerah menjadi tidak terkendali. Semakin ketat karena kekhawatiran akan terjadinya penyelewengan modal. Pengawasan publik yang ketat akan memberikan tekanan pada pemerintah daerah untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja keuangan mereka secara keseluruhan, sekaligus mencapai pengakuan publik bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan untuk berkinerja baik secara keuangan.

### **D. Pertumbuhan Ekonomi**

Singkatnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian ini, ada tiga aspek yang harus ditekankan, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai suatu proses artinya pertumbuhan ekonomi bukanlah gambaran perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, artinya ada dua hal yang perlu diperhatikan: total output (PDB) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah total output dibagi jumlah penduduk. Aspek jangka panjang berarti peningkatan output per kapita harus diamati dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20 atau 50 tahun, bahkan mungkin lebih).

Sebuah negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan riil warganya meningkat dari tahun ke tahun. Ada dua jenis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini, yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, kita bisa menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto) secara nasional atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk wilayah tertentu. Menurut Sukirno (2011), ada empat faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi:

1. Sumber Daya Alam: Keberadaan tanah dan kekayaan alam yang melimpah memudahkan pengembangan ekonomi, terutama di awal pembangunan.
2. Sumber Daya Manusia: Penduduk yang jumlahnya cukup dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja akan meningkatkan produktivitas dan produksi barang dan jasa.
3. Teknologi dan Infrastruktur: Kemajuan teknologi dan infrastruktur yang memadai memainkan peran penting dalam memajukan ekonomi dan meningkatkan efisiensi produksi.
4. Kondisi Sosial dan Budaya: Sikap dan perilaku masyarakat yang mendukung kemajuan, seperti disiplin dan kerja keras, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Singkatnya, pertumbuhan ekonomi adalah proses yang dipengaruhi berbagai faktor. Memahami faktor-faktor ini penting untuk membuat kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi bisa terjadi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang positif untuk menjalankan fungsinya dengan optimal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan investasi dan pendapatan daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan program pembangunan.

### 3. RESEARCH METHOD

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2018. Total populasi berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2020) adalah 30 Kabupaten/Kota.

Peneliti menggunakan metode sampel purposive sampling untuk memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih sampel yang memiliki karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diaudit oleh BPK RI.
2. Pemerintah daerah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menampilkan data dan informasi (Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran) pada tahun 2018 yang dapat diakses oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berarti data diperoleh dari pihak lain, bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, yaitu:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2018: Data ini diperoleh dari situs web resmi masing-masing pemerintah daerah. Laporan keuangan ini memuat informasi penting tentang kondisi keuangan daerah, seperti pendapatan, belanja, dan aset.
2. Data Non-Keuangan: Data non-keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah anggota DPRD dan karakteristik kepala daerah. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti situs web resmi pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber lain di internet.
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI): BPK RI merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Data dari BPK RI dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan sumber lainnya. Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta informasi non-keuangan melalui daring atau permintaan langsung.

### 4. RESULTS AND DISCUSSION

#### A. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi sebagai lensa yang membantu dalam memahami gambaran data secara keseluruhan. Melalui analisis ini, kita dapat menguji karakteristik data dengan menggunakan ukuran seperti maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Statistik Deskriptif dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
Variabel Penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah Daerah	30	1311128243281,00	17377441188340,00	4834905216857,1340	3276196226813,81930
Pertumbuhan Ekonomi	30	3,05	7,01	5,4960	,83919
Kinerja Keuangan Pemerintah	30	,80	1,02	,9235	,07193
Valid N (listwise)	30				

Berdasarkan tabel yang disajikan, kita dapat menarik beberapa poin penting terkait ukuran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi:

Ukuran Pemerintah Daerah:

- Rata-rata: 4.834.805.216.857
- Standar Deviasi: 3.276.196.226.813
- Nilai Minimum: 1.311.128.243.281 (Kota Sabang)
- Nilai Maksimum: 17.377.441.188.34 (Kabupaten Sidoarjo)

Pertumbuhan Ekonomi:

- Rata-rata: 5,4960%
- Standar Deviasi: 0,83919%
- Nilai Minimum: 3,05% (Kabupaten Cilacap)

- Nilai Maksimum: 7,01% (Kota Gorontalo)

Besaran pemerintahan daerah sangat bervariasi antar wilayah yang dianalisis. Kota Sabang mempunyai pemerintahan daerah terkecil, sedangkan Kabupaten Sidoarjo mempunyai pemerintahan daerah terbesar. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan variasi yang signifikan. Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan ekonomi paling lambat, sedangkan Kota Gorontalo menunjukkan pertumbuhan ekonomi paling pesat. Rata-rata, pemerintah daerah menunjukkan ukuran yang moderat dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar pada 5,5%.

Rata-rata pemerintah daerah mengelola keuangannya secara efisien dengan skor 0,9235. Hal ini menunjukkan bahwa belanja secara umum terkendali karena skor rata-rata turun di bawah 1 atau 100%. Kabupaten Purwakarta menonjol karena efisiensi keuangannya yang luar biasa, dengan skor 0,80, terendah di antara seluruh wilayah. Sebaliknya Kabupaten Banjarnegara mempunyai efisiensi pengelolaan keuangan yang paling rendah yaitu dengan skor 1,02.

### B. Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data dalam penelitian memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,07119771
Most Extreme Differences	Absolute	,138
	Positive	,114
	Negative	-,138
Kolmogorov-Smirnov Z		,756
Asymp. Sig. (2-tailed)		,617

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test adalah 0,617. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data residual berdistribusi normal.

#### 2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengecek adanya korelasi antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi yang ideal tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Model tersebut bebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
UKURAN_PEMERINTAH	,999	1.001
PERTUMBUHAN_EKONOMI	,999	1.001

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas diketahui nilai tolerance pada masing-masing variabel > 0,1, sedangkan untuk nilai VIF pada masing-masing variabel < 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel, dan model regresi bebas dari multikolinearitas, sehingga layak digunakan untuk melanjutkan penelitian.

#### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan varian residual antar pengamatan dalam model regresi (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, dapat digunakan uji Glejser.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

### C. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data dalam penelitian memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.855	.093		9.151	.000
	UKURAN_PEMERINTAH	1.002E-013	.000	.011	.060	.953
	PERTUMBUHAN_EKONOMI	.012	.016	.142	.746	.462

Berdasarkan Tabel di atas terdapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Kinerja Keuangan = 0,855 + 1,002(Ukuran Pemerintah) + 0,012(Pertumbuhan Ekonomi).

Berikut interpretasi persamaan regresi linear berganda di atas:

1. Pada persamaan diperoleh nilai konstanta sebesar 0,855 yang berarti variabel kinerja keuangan pemerintah daerah hasilnya konstan tanpa dipengaruhi variable independen lainnya sebesar 0,855.
2. Koefisien variabel dari ukuran pemerintah daerah adalah sebesar 1,002 yang berarti ketika ukuran pemerintah daerah meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat sebesar 1,002.
3. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi adalah 0,012 yang berarti ketika variabel pertumbuhan ekonomi meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat sebesar 0,012.

### D. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk menyatakan besar atau kecilnya kontribusi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen memengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) besarnya hanya antara 0-1 ( $0 < R^2 < 1$ ).

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted RSquare	Std. Error of the Estimate
1	.142 <sup>a</sup>	.020	.052	.073788

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,052 atau 5%. Nilai tersebut berarti bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 5%. Sedangkan 95% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak menjadi variabel independen di penelitian ini.

### E. Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh individual satu variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Variabel independen dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 6. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.855	.093		9.151	.000
UKURAN_PEMERINTAH	1.002E-013	.000	.011	.060	.953
PERTUMBUHAN_EKONOMI	.012	.016	.142	.746	.462

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,953, yang lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H1 ditolak.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,462, yang lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H2 ditolak.

## 5. CONCLUSION

Berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan mengenai ukuran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya:

1. Perluasan Sampel Pemerintah Daerah

Penelitian ini akan lebih kuat dengan melibatkan lebih banyak sampel pemerintah daerah dari berbagai wilayah dan tingkat perkembangan. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

2. Perpanjangan Jangka Waktu Penelitian

Melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih lama, misalnya 5-10 tahun, dapat memberikan gambaran tren dan pola kinerja keuangan pemerintah daerah dari waktu ke waktu. Hal ini akan membantu dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan secara lebih mendalam.

3. Penambahan Variabel Karakteristik Kepala Daerah

Penelitian ini dapat diperkaya dengan menambahkan variabel terkait karakteristik kepala daerah, seperti masa jabatan, usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman politik. Analisis pengaruh variabel-variabel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor non-ekonomi yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

## REFERENCES

- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 110–120.
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2), 1–19. <https://doi.org/10.35794/jpekd.12789.18.2.2016>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>